

Model Pertanggungjawaban Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri Di Wilayah Polres Bogor Untuk Keadilan Dan Kepastian Hukum

Mochamad Ardian Wijaya,¹ Dadang Suprijatna,² Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,
mocha.ardianwijaya@gmail.com

²Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan hukum harus dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang, karena persoalan kecurangan dalam proses seleksi anggota polri merupakan pelanggaran hukum dan menjadi fenomena hukum yang perlu dilihat dari aspek hukum untuk mewujudkan *trust building*. tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mengetahui model pertanggungjawaban penerimaan pendaftaran calon anggota polri di wilayah polres bogor untuk keadilan dan kepastian hukum". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji data kepustakaan sebagai data utama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban penerimaan pendaftaran calon anggota Polri di wilayah Polres Bogor untuk keadilan dan kepastian hukum serta untuk memperoleh anggota Polri yang berkualitas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pendaftaran Polri, Keadilan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang di dalamnya memuat cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.¹ Yang

¹ Tirta Segara, *Seri Literasi Keuangan Buku 2 - Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2019, Hlm.6

diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional,² yang berkeadilan dan merata.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nasional baik dalam bidang pembangunan fisik maupun perekonomian. Salah satu indikator kesejahteraan adalah peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pemerintah, salah satunya ialah perekrutan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri.

Perekrutan anggota baru Polri disesuaikan dengan kebutuhan institusi Polri untuk mengisi kekosongan pada bagian-bagian yang diperlukan, dan melaksanakan tugas Polri dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan kemandirian dan ketertiban, serta melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, maka pemerintah melalui kementerian dalam negeri akan memberikan formasi sesuai kebutuhan Polri yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setelah pemerintah menetapkan kuota Polri maka akan dilaksanakan proses seleksi yang diawali dengan pengumuman perekrutan anggota baru dan tahapan seleksi.

Tahapan seleksi anggota baru Polri biasanya dilaksanakan melalui pendaftaran. Pada tahap pendaftaran ini para calon peserta akan diminta berkas-berkas persyaratan, biasanya dilakukan melalui alur yang sudah disediakan yaitu penerimaan berkas (registrasi), verifikasi berkas, tahapan tes yang meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes psikotes, tes akademik, sidang sementara, pemeriksaan kesehatan kedua,

² Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini. *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 12 Nomor 1, Universitas Djuanda, Januari 2020

tes kesehatan jasmani, PMK, pemeriksaan administrasi akhir, supervisi, sidang penetapan kelulusan.

Proses yang begitu panjang dan membutuhkan waktu berminggu-minggu tentunya akan berpotensi menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh bagian penerimaan anggota baru berupa kolusi dan nepotisme, suap, dan sogok yang bertujuan untuk meloloskan peserta calon anggota baru tertentu.

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa banyak orang tua yang membayar sejumlah uang tertentu kepada oknum tertentu untuk meloloskan anaknya atau keluarga mereka. Bahkan diseluruh Indonesia walaupun tidak secara resmi diberitakan adanya sogok dalam perekrutan anggota polri namun dari lisan ke lisan peneliti sering mendengar adanya sogok dalam proses seleksi anggota baru. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam proses seleksi anggota baru yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Selain itu, kecurangan pada komputerisasi masih dapat dilakukan yaitu dengan menaikkan nilai peserta tertentu agar nilainya mencapai standar nilai kelulusan, dengan merubah pada sistem sehingga dapat menggeser nilai peserta lain yang secara proses memperoleh nilai yang tinggi. Hal ini tentunya bertentangan rasa keadilan, karena orang yang seharusnya lulus sebagai anggota polisi justru tergantikan dengan orang yang nilainya didongkrak. Tentunya dari aspek hukum persoalan ini merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum, karena proses seperti ini tentunya disertai dengan sogok, dan pungli.

Maka hukum harus menjadi acuan³ bagi setiap orang yang melaksanakan tugas sebagai abdi negara sehingga mengerti pentingnya melaksanakan tugas dengan baik, tidak merugikan orang lain, tidak

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2013, Hlm.87.

menerima sogok, tidak mementingkan keluarga, teman, dan atasan yang pada akhirnya mengabaikan rasa keadilan, mengambil hak orang lain.

Apalagi anggota polri merupakan bagian dari institusi polri dan negara yang melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁴

Di era reformasi ini birokrasi harus dijalankan dengan baik,⁵ sehingga kepercayaan terhadap institusi negara semakin tinggi, khususnya institusi kepolisian yang merupakan institusi berwibawa. Jika proses perekrutan anggota polri dilaksanakan dengan kecurangan maka akan melahirkan mosi tidak percaya kepada institusi polri.

berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Polri, polri memiliki beberapa tugas pokok⁶ polri melakukan tugas dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat,⁷ maka apa anggota polri harus memiliki integritas yang tinggi, mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa tendensi dari pihak manapun.

Hal ini karena kinerja anggota polri dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu,⁸ misalnya disogok, dijanjikan jabatan, dipengaruhi pimpinan, dipengaruhi keluarga, dipengaruhi teman atau faktor lainnya.

Sehingga mutu pelayanan dan kualitas pelayanan pada institusi polri akan dipertanyakan,⁹ karena memberikan citra buruk pada institusi polri. Maka dalam hal penegakan hukum atau pertanggung jawaban

⁴ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2014, Hlm.82.

⁵ Edi Saputra Hasibuan, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 7 Nomor 1, Dosen Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta June 2021

⁶ Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2010, Hlm.118.

⁷ Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.44.

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, Hlm.119.

⁹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, Hlm.121.

hukum siapakah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan norma hukum.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan hukum harus dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang, karena persoalan kecurangan dalam proses seleksi anggota polri merupakan pelanggaran hukum dan menjadi fenomena hukum yang perlu dilihat dari aspek hukum untuk mewujudkan *trust building* (membangun kepercayaan)¹⁰ guna mencapai tujuan organisasi polri.¹¹

Maka untuk menemukan aspek hukum dari pelanggaran dalam proses seleksi perlu ada mengkaji secara ilmiah. Bagaimana pertanggung jawaban hukumnya, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mengetahui model pertanggungjawaban penerimaan pendaftaran calon anggota polri di wilayah polres bogor untuk keadilan dan kepastian hukum”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji data kepustakaan¹² sebagai data utama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penguraian data penelitian dalam bentuk narasi yang menggambarkan tentang hasil penelitian.¹³

¹⁰ Neny Probowati, “Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance and Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah”, Tesis (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2017), 8.

¹¹ Syaiful Ahmat Baraweri dan Suharnomo, "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi (Studi Pada Karyawan Kantor Wilayah Bank BRI Semarang)", *Journal of Management*, Volume 4 Nomor 4, 2015

¹² Martin Roestamy et all, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Pada Fakultas Hukum, Bogor, 2020, Hlm. 41

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 35.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum utama, bahan hukum kedua, bahan hukum pendukung.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Personel Polres Bogor dalam Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri Di Wilayah Polres Bogor Untuk Keadilan Dan Kepastian Hukum

Kinerja anggota personel Polres Bogor dalam pelaksanaan penerimaan pendaftaran calon anggota polri di wilayah Polres Bogor masih terus ditingkatkan.¹⁵ Beberapa hal yang menjadi indikator kinerja polres Bogor dalam penerimaan anggota baru ialah Sumber Daya Manusia (SDM), sistem kerja, keuangan, hasil yang dicapai, dan laporan. Kinerja anggota polri didasarkan pada Peraturan Polri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK).¹⁶

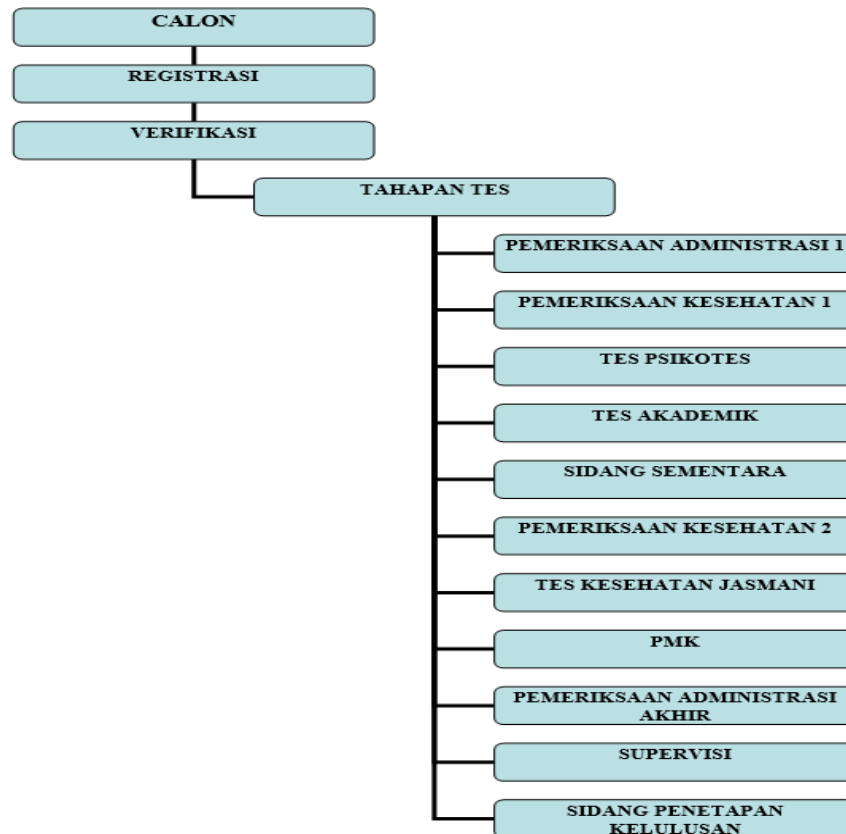
SDM atau anggota personel pada polres Gogor harus memiliki kualifikasi keilmuan yang memadai, mampu mengoperasikan komputer, menggunakan aplikasi atau sistem yang dijalankan pada proses penerimaan anggota baru. Sehingga terstruktur dan sistematis dalam melakukan proses penerimaan anggota baru dalam sistem penilaian pun tidak terburu-buru.¹⁷ Untuk mengetahui alur perekrutan anggota baru di polres Bogor, perlu penulis uraikan bagan yang menggambarkan tentang tahapan seleksi anggota baru, berikut bagannya.

¹⁴ Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.141.

¹⁵ Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024

¹⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, Hlm.44.



Pada bagan tersebut dapat dilihat bahwa tahapan seleksi anggota baru pada polres Bogor dilakukan melalui tahap registrasi, yaitu calon anggota baru datang ke kantor menemui anggota personel yang ditugaskan oleh lembaga pada bagian registrasi, namun di era sekarang ini pendaftaran anggota polri sudah bisa melalui online.

Setelah melakukan registrasi dengan menyiapkan berkas yang dipersyaratkan oleh polri maka akan dilakukan proses verifikasi berkas, yaitu memilah satu persatu untuk mengathui apakah berkas yang bawa sudah lengkap atau belum dan kurang atau tidak. Verifikasi berkas ini harus dilakukan secara hati dan teliti, jangan sampai ketidaktelitian menyebabkan terlewatkan sebagai berkas sehingga dianggap tidak memenuhi, atau hilang karena kelalaian.

Setelah verifikasi berkas para peserta akan menunggu untuk mengikuti tahapan tes, tes yang dilalui oleh para peserta ialah pemeriksaan administrasi 1 yaitu pemeriksaan adminisitasi yang berkaitan dengan

berkas yang dibawa pada saat registrasi, setelah selesai maka dilanjutkan pada pemeriksaan kesehatan, tes kesehatan merupakan bentuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui peserta memiliki anggota tubuh yang sempurna, tidak cacat, tidak menderita penyakit tertentu untuk memastikan peserta dapat mengikuti tahapan selanjutnya dalam seleksi.

Tes psikotes atau tes kejiwaan biasanya untuk mengetahui bahwa peserta memiliki fungsi otak yang baik, akan yang sehat, tidak memiliki gangguan jiwa dengan indikator bahwa mampu membedakan warna, benda, orang, objek-objek yang dapat dilihat secara kasat mata.

Polres Bogor juga menyelenggarakan tes akademik bagi peserta calon anggota baru guna mengetahui kecerdasan peserta materi yang diuji ialah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, peraturan perundang-undangan, keagamaan. Hal ini karena pengetahuan seorang anggota Polri tentang kebangsaan dan peraturan perundang-undangan sangat penting.

Selanjutnya akan dilakukan sidang sementara, sidang sementara ini dilakukan untuk menetapkan peserta yang gugur pada tahap ini, dan siapa saja yang akan lanjut pada tahap berikutnya, sudah mulai memperkecil jumlah yang akan ikut dalam seleksi.

Setelah penetapan siapa saja yang lolos pada tahap selanjutnya, maka akan dilakukan tes kesehatan tahap kedua hal karena bisa jadi dalam proses atau tahapan sebelumnya ada peserta yang mengalami gangguan kesehatan.

Berikutnya tes kesehatan jasmani yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui fisik seorang calon anggota Polri di Polres Bogor biasanya jenis tes yang diujikan ialah push up, scot jump, lari, restok, angkat beban dan lain-lain.

Selanjutnya akan dilakukan tes PMK, yaitu tes pengetahuan, moral, dan kedisiplinan. Tes ini merupakan bagian terpenting yang harus diikuti oleh seluruh peserta ikut hal ini karena pengetahuan seorang anggota Polri

menjadi hal penting terutama pengetahuan tentang tugas polri, peraturan perundang-undangan dan keagamaan. Pada tes ini juga peserta akan dites moral yang berkaitan dengan perilaku akhlak yang baik, sehingga nanti bila jadi anggota polisi akan menerapkan dalam tugas dan masyarakat.

Tahapan selanjutnya pemeriksaan administrasi akhir, taap semua bentuk administasi dilakukan, selanjutnya supervisi yaitu pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan, yang terpenting dari tahap ini ialah adanya pembinaan berupa pengarahan kepada para peserta tentang menjadi anggota polri yang baik, menjaga nama institusi dan menjadi panutan dalam masyarakat.

Dan yang terakhir ialah sidang penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan merupakan bagian paling akhir dari semua tahapan yang dilaksanakan secara formal. Momen ini merupakan momen paling menegakngkan bagi para calon anggota polri karena akan mendengar secara langsung kelulusannya.

Untuk menilai kinerja personel Polres Bogor dalam penerimaan anggota baru menggunakan indikator berikut:¹⁸

1. Input

Yaitu proses yang dilakukan untuk penerimaan anggota baru dengan menggunakan sistem baik atau tidak. Kriteria anggota baru, kualitas proses yang dilaksanakan dalam seleksi yang baik

2. Proses

Proses pelaksanaan seleksi anggota polri yang dilaksanakan di polres Bogor apakah cukup ideal atau tidak.

3. Output

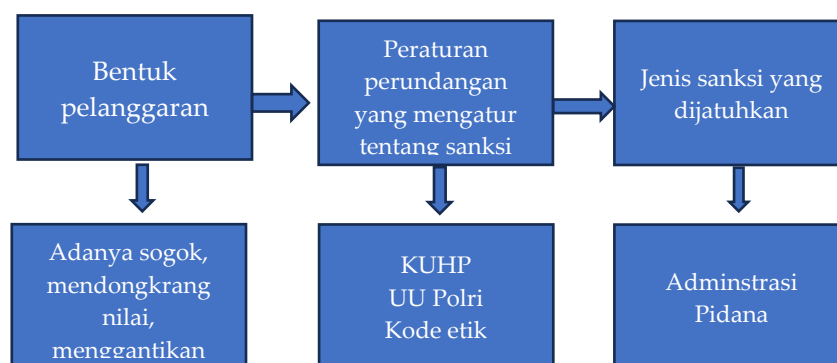
Dari proses yang dilakukan tentunya akan menunjukkan hasil kualitas yang baik dan output merupakan haraan dari institusi polri

¹⁸ Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024.

apakah anggota yang diseleksi sudah merupakan anggota memiliki integritas tinggi terhadap tugas.

B. Model Pertanggungjawaban Hukum Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri Di Wilayah Polres Bogor Untuk Keadilan Dan Kepastian Hukum

Pertanggung jawaban hukum ialah bentuk kesediaan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum untuk menerima sanksi, mengikuti proses penegakan hukum sampai pada penjatuhan sanksi. Berikut ini penulis uraikan tentang bagan model pertanggung jawaban hukum penerimaan pendaftaran calon anggota polri di wilayah polres Bogor.



Gambar tersebut menjelaskan tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh setiap personel dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru pada polres Bogor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus siap meneri sanksi yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam negara hukum setiap persoalan hukum yang terjadi harus diselesaikan dengan hukum untuk memberikan kepastian dalam penerapannya, tidak mengabaikan hak-hak pelaku dan untuk menjamin terwujudnya penegakan hukum yang ideal.

kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁹

(Prancis), "*ius*" (Latin), "*derecto*" (Spanyol), "*dirrito*" (Italia).²⁰

Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.²¹

Dari beberapa definisi hukum di atas, hukum dapat diklasifikasikan kedalam berbagai bentuk yang dinyatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:²²

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:²³

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Personel Polres Bogor dalam Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri Di Wilayah Polres Bogor dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum maksimal sesuai Peraturan Polri

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm.12.

²⁰ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2012, Hlm.11.

²¹ J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Hlm.1.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, Hlm.18.

²³ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm.46.

Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK), sehingga kinerja dapat ditingkatkan.

2. Model Pertanggungjawaban Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri Di Wilayah Polres Bogor Untuk Keadilan Dan Kepastian Hukum dapat diterapkan dengan merekrut Brigadir Polri di Polres Bogor yang merupakan proses mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi. Dalam pelaksanaannya Markas Besar Polisi Republik Indonesia memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Daerah untuk pelaksanaan dan penentuan kelulusan penerimaan Brigadir Polri.

REFERENSI

Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2010.

Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2009.

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013.

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.

Dani Purwanto, Ujang Bahar,Endeh Suhartini. *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 12 Nomor 1, Universitas Djuanda, Januari 2020

DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2014.

Edi Saputra Hasibuan, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 7 Nomor1,Dosen Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara JakartaJune 2021.

- J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2013.
- Martin Roestamy et all, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Pada Fakultas Hukum, Bogor, 2020.
- Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Neny Probowati, "*Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance and Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah*", Tesis (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2017).
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020..
- Syaiful Ahmat Baraweri dan Suharnomo, "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi (Studi Pada Karyawan Kantor Wilayah Bank BRI Semarang)", *Journal of Management*, Volume 4 Nomor 4, 2015.
- Tirta Segara, *Seri Literasi Keuangan Buku 2 - Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2019.
- Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2012.
- Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024

Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024

Wawancara dengan Anggota Polri Polres Bogor, April 2024.